

## **U.S REBALANCE TOWARD ASIA DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI TRANS PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) PADA ERA PRESIDEN BARRACK OBAMA**

**Aditya Very Cleverina<sup>1</sup>**

Salieg Luki Munestri, S.S, MA<sup>2</sup>

### abstract

The United States is one of the super power states in the Asia Pacific region that experienced the Subprime Mortgage crisis in 2008. This is the main reason for the shift in the direction of economic trade policy of America to Asia (Pivot to Asia) as a way to accelerate post-crisis recovery. America believes Asia is a rapidly growing region that prompted the United States to balance Asia's growth, making its key partner in Rebalance towards Asia strategy. This strategy was implemented one of them by joining the United States into Trans Pacific Partnership (TPP) in 2009. The beginning of the TPP was the initiation of the four APEC member countries which was later named P4. Since joining, during the period of 2009 - 2016 the United States continues to work in negotiations both within and among the twelve member countries of TPP. As the newest 21st century trade agreement, TPP is turned into the most comprehensive and up-to-date trading agreement

This research aims to explain and analyze the rationality of the United States in its membership in the TPP as a manifestation of the strategy Rebalance towards Asia. Meanwhile, to explain the subject of this study, this research will use the concept of interest method with neoliberalism and regionalism as perspective in descriptive qualitative research. As a result of this study, it is concluded that US rationalities in TPP is to be able to form a closer synergy among Asia-Pacific countries by highlighting the similarity of economic interests. In addition, the ability of the United States to negotiate can bring some benefits to the United States within TPP membership

**Keywords:** *TPP, Rebalance towards Asia, Asia Pacific, United States.*

---

[1] Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS. Sebagai penulis Pertama

[2]Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS, Sebagai penulis Kedua

## A. Pendahuluan

Adanya krisis *Subprime Mortgage* yang menimpa Amerika Serikat pada akhir tahun 2007 dirasa dapat mengancam kestabilan negara adidaya tersebut. Krisis Amerika Serikat telah dimulai akibat kejatuhan sektor perumahan yang disebabkan meningkatnya kredit perumahan yang berisiko tinggi (*subprime mortgage*) pada bulan Agustus tahun 2007 menyebabkan kredit macet dan merosotnya harga saham global hingga pertengahan tahun 2009.<sup>1</sup> Laporan sidang *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang dihadiri menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral 185 negara pada 12 – 13 April 2008, serta pertemuan G 7 pada April 2008 di Washington, memastikan kerugian finansial akibat krisis *subprime mortgage* Amerika mencapai hampir US \$1 triliun.<sup>2</sup> Krisis tersebut juga mengakibatkan turunnya industri konstruksi, manufaktur, jasa dan pasar properti minus 24% (tahun 2007), dan 4,6% (tahun 2009), meningkatnya inflasi sebanyak 4,3% dan angka pengangguran mencapai 5% pada Januari 2008.<sup>3</sup> Puncaknya pertumbuhan ekonomi menurun ke arah 1% bahkan mendekati minus.<sup>4</sup>

Guna menghadapi krisis *Subprime Mortgage* ini dibutuhkan langkah penanggulangan yang efisien agar tidak memperparah efek yang

ditimbulkan. Adanya recalibrasi dalam strategi kebijakan perdagangan internasional dan perubahan fokus Amerika Serikat dari Barat ke Timur dipandang menjadi salah satu cara yang dapat menyelesaikan krisis finansial yang ada. Oleh karena itu, pemerintah Obama kemudian mengeluarkan strategi *rebalancing* terhadap Asia-Pasifik dan mulai menetapkan keputusan untuk dapat bergabung dengan kerjasama regional di kawasan Asia-Pasifik.

Pergeseran fokus politik luar negeri Obama ini menekankan bagaimana pentingnya potensi Asia-Pasifik untuk mencapai prioritas tertingginya yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat Amerika. Konsep tersebut disampaikan oleh Presiden Obama dalam pidatonya tentang *rebalance towards Asia* di dalam keterlibatan Amerika Serikat di *Trans Pacific Partnership* (TPP). Amerika Serikat menjadikan perjanjian TPP sebagai prioritas utama negaranya untuk meningkatkan ekspor, melindungi sektor bisnis diluar negeri, dan menciptakan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat.<sup>5</sup> Hal ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat pada KTT-19 APEC di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat:

*We just had an excellent meeting and I'm very pleased to announce that our nine nations have reached the broad outlines of an agreement. There are still plenty of details to work out, but we are confident that we can do so. So we've directed our teams to finalize this agreement in the coming year. It is an ambitious, but we are optimistic that we can get it done. The TPP will boost our economies, lowering barriers to trade and investment, increasing export, and creating more jobs for our people, which is my number-one priority.*

*Along with our trade agreements with South Korea, Panam dan Colombia, the TPP will also help achieve my goal of doubling U.S.exports, which support millions of American jobs.*<sup>6</sup>

Pada bulan Maret tahun 2008, Amerika Serikat ikut bergabung dalam *Trans Pacific Partnership* (TPP) untuk dapat menyelesaikan investasi dan jasa ketentuan keuangan Amerika Serikat.<sup>7</sup> Bagi Amerika Serikat, TPP merupakan *cornerstone* dari kebijakan ekonomi pemerintahan Obama di Asia-Pasifik, sebuah prioritas di dalam strategi *rebalancing* . Oleh karena itu, keberhasilan TPP merupakan *sine qua non* dari keberhasilan strategi *rebalancing* Amerika Serikat.

Bagi Amerika Serikat TPP memiliki potensi sebagai model regionalisme terbuka dan batu loncatan menuju liberalisasi perdagangan multilateral, bukan halangan atau batu sandungan dari sistem FTA yang telah dibuat sebelumnya.<sup>8</sup> Selain itu, dengan adanya TPP dapat menolong memajukan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.<sup>9</sup> Sehingga demi mencapai keuntungan yang maksimal adanya kerjasama internasional dalam *frame* institusional sama sama membantu negara baik negara yang dikategorikan sebagai negara maju maupun negara berkembang. Sterling-Folker melihat dalam pandangan kaum neoliberalis, kerjasama internasional antar negara maka akan tercipta *national interest* yang sama oleh masing-masing negara yang bekerjasama.<sup>10</sup> Hal tersebut menciptakan kondisi yang kondusif karena konflik akan relatif

berkurang dibandingkan apabila negara tidak bekerja sama. Melalui *frame* kerja sama, maka masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan yang setara.<sup>11</sup>

## **B. Proses Pembuatan Kebijakan Persetujuan TPP dalam Kongres Amerika**

### **Serikat**

Proses pengambilan keputusan kebijakan suatu negara akan melibatkan berbagai pihak dengan pengkajian mendalam karena menyangkut dari tujuan dan kepentingan negara tersebut. Seperti halnya pembahasan persetujuan TPP yang menjadi agenda ekonomi utama yang dicanangkan oleh Presiden Barrack Obama. Secara garis besar terdapat dua proses arah negosiasi demi terwujudnya TPP bagi Amerika Serikat, yakni negosiasi luar negeri dengan sesama negara anggota TPP dan negosiasi dalam negeri demi disetujuinya TPP di dalam kongres. Mengingat pentingnya persetujuan TPP ini, maka dijalankanlah *Trade Promotion Authority* (TPA) atau bisa disebut dengan metode *fast track* dimana metode ini disahkan oleh *Senate Finance Committee* pada 22 April 2015.<sup>12</sup> TPA adalah proses yang telah disediakan Kongres bagi Presiden untuk memungkinkan undang-undang dapat menyetujui dan melaksanakan kesepakatan perdagangan internasional tertentu yang harus dipertimbangkan dalam prosedur legislatif yang dipercepat

pembahasannya dan dengan periode yang terbatas, dengan syarat Presiden memperhatikan kewajiban hukum tertentu.<sup>13</sup> Sehingga dalam TPA Kongres dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya bersamaan dengan Presiden untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan meyakinkan mitra dagang AS. Diberlakukannya TPA ini mengandung maksud agar mempersingkat waktu persetujuan Kongres dalam kaitannya membahas perjanjian perdagangan. Proses pembahasan TPP dalam Kongres menggambarkan adanya beberapa pandangan baik dari saksi ahli sebagai sumber yang kredibel, pelaku ekonomi yang bersangkutan langsung ketika TPP diterapkan serta anggota senat dan Kongres sebagai wakil dari suara rakyat.

### **C. Proses Negosiasi dalam TPP**

Selama kurang lebih sepuluh tahun pembahasan rancangan kerjasama TPP, telah dilaksanakan tujuh belas putaran negosiasi yang dilakukan oleh anggota TPP. Dimulai dari empat putaran negosiasi TPP yang diadakan pada tahun 2010, lima putaran pada tahun 2011 hingga putaran terakhir pada tahun 2015. Fokus negosiasi pada perundingan di TPP yang memakan waktu hingga kurang lebih satu dekade mencakup beberapa hal seperti negosiasi mengenai hak kekayaan intelektual,

perdagangan layanan yang dimiliki pemerintah atau BUMN, investasi, kompetisi, tenaga kerja, hingga lingkungan.

Berikut ini adalah dua hal utama yang diajukan Amerika Serikat dalam proses negosiasi TPP ini:

1. Kebijakan Kekayaan Intelektual

Perlindungan dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi masalah prioritas tinggi untuk Amerika Serikat terutama pada tahun 2010.<sup>14</sup> Menurut USTR, Amerika dengan gigih melakukan perlindungan dan penegakan HKI untuk mengurangi hambatan untuk ekspor dan investasi AS, dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok berupa melakukan perdagangan pemalsuan baik secara eceran dan grosir, pembajakan buku dan jurnal, pembajakan perangkat lunak, dan pembajakan hak cipta melalui Internet.<sup>15</sup> Hampir 40 juta pekerjaan di Amerika secara langsung atau tidak langsung melibatkan oleh industri *IP-intensive*. Industri *Intellectual Property* ini menjadi sangat penting di Amerika karena meliputi adanya hak paten, *trademarks*, dan *copyrights* yang dapat memberikan pemasukan kepada pemilik hak tersebut. Industri ini memberi upah lebih tinggi kepada pekerja mereka dengan mendorong sekitar 60 persen ekspor barang dagangan AS dan sebagian besar ekspor jasa lebih tinggi.<sup>16</sup>

2. Akses Pasar

Akses pasar untuk barang, jasa, dan pertanian sering menjadi inti perundingan FTA. Negosiasi yang di ajukan Amerika dalam poin ini fokus untuk menyelesaikan adanya penghalang seperti tarif, dan bentuk perlindungan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, Cathleen Cimino-Isaacs sebagai berikut:

The United States pushed for greater market access in areas like services and was also critical in wresting concessions from Japan in protected sectors like agriculture. The US was a big proponent of new rules related to state-owned enterprises, ecommerce, and labor and environmental standards. For example, in the area of labor in particular, the United States pushed for high standards, negotiating bilateral deals with Brunei, Malaysia and Vietnam, which established concrete reform plans to help comply with TPP obligations. In areas such as labor and environment, the US also pushed for enforceable obligations subject to dispute settlement.<sup>17</sup>

Amerika Serikat secara serius mengajukan poin negosiasi pembukaan akses pasar dikarenakan selama beberapa dekade ini Amerika memang mengalami kesulitan dalam keterbukaan pasar utamanya dengan negara seperti Jepang dan Vietnam. Dari terbukanya akses pasar inilah dapat dilakukan negosiasi lanjutan atas komoditas sektor industri apa saja dan bagaimana pemberlakuan tarrif dalam transaksi perdagangan. Melewati TPP inilah negosiasi untuk keterbukaan pasar berhasil di dapatkan oleh Amerika Serikat. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh narasumber, Cathleen Cimino-Isaacs sebagai berikut:

Several US sectors had much to gain from the TPP—the agricultural sector from gaining access to new markets, most notably Japan who agreed to liberalize highly protected sectors;

the US service sector from new market access in Japan, Malaysia and Vietnam in particular; and US producers of high tech, high value manufacturing goods as TPP countries agreed to liberalize 99 percent of tariffs and perhaps more importantly, high nontariff barriers.<sup>18</sup>

#### **D. Rasionalitas Amerika Serikat dalam TPP**

Dengan bangkitnya Asia, penyeimbangan AS terhadap Asia adalah salah satu wujud strategi Amerika dalam memajukan kepentingannya. Mengingat pentingnya Asia yang nampak secara signifikan pada paruh pertama abad ke-21, strategi besar kebijakan luar negeri, perdagangan dan keamanan AS cenderung akan terus berfokus pada kawasan Asia Pasifik. Sebagai inisiatif perdagangan terkemuka Amerika pada era kebijakan administrasi Obama, TPP berperan sebagai manifestasi dari penerapan strategi *rebalancing* di Asia-Pasifik yang dapat menjadi landasan untuk membentuk arsitektur ekonomi di kawasan ini.<sup>19</sup> Keanggotaan Amerika Serikat dalam TPP, menjadikan regionalisme Asia Pasifik menjadi kerangka kerja yang paling efektif untuk dijadikan sebagai kerjasama regional yang spesifik.<sup>20</sup> Sehingga diharapkan selain dapat membentuk institusi yang memajukan ekonomi namun dapat mempererat hubungan anggota dalam kawasan Asia Pasifik.

##### **1. TPP Sebagai Alat Kekuatan Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik**

Rasionalitas TPP bagi Amerika secara praktikal meliputi tiga bagian yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan Amerika Serikat yakni:

1. TPP Menghapus Pajak untuk *Made in America Products*

Sebagai organisasi yang mengeliminir *tarrif* dan *barriers* maka hal ini dapat menghilangkan lebih dari 18.000 pajak yang diberlakukan oleh berbagai negara terhadap ekspor produk *Made-in-America*. Lebih dari itu, TPP juga memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pasar baru yang vital di wilayah Asia Pasifik untuk pekerja, bisnis, petani, dan pekerja AS.

2. TPP Mengatur Perlindungan Ketenagakerjaan Paling Komprehensif Sepanjang Sejarah *Trade Agreement* Amerika

TPP memprioritaskan pekerja dengan menetapkan standar ketenagakerjaan tertinggi yang pernah dibuat dalam perjanjian perdagangan. TPP mengharuskan semua negara anggotanya memenuhi standar ketenagakerjaan dan dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja.<sup>21</sup>

3. TPP Membantu *Small Business* dalam Global Trade

Pertama kalinya dalam perjanjian perdagangan, TPP mencakup sebuah bab yang secara khusus ditujukan untuk membantu usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan keuntungan dari *Global Trade*. *Small Business* adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan lapangan kerja di AS, namun terlalu sering pada implementasinya terdapat hambatan perdagangan yang membatasinya dari pasar luar negeri yang penting utamanya saat *small business* ini mencoba mengekspor barang. Terdapat 98 persen perusahaan usaha kecil dan menengah Amerika yang melakukan ekspor, namun kurang dari 5 persen dari usaha ekspor tersebut yang mendapatkan keuntungan. Hal tersebut berarti terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk usaha kecil untuk memperluas bisnis mereka dengan mengekspor lebih banyak ke 95 persen konsumen global termasuk ke negara-negara anggota TPP.

## **2. TPP Sebagai Alat Politik di Wilayah Asia Pasifik**

Peluncuran strategi *Pivot to Asia* pada tahun 2009, yang kemudian melalui TPP sebagai pilar utama merupakan bagian dari strategi ekonomi politik internasional AS yang lebih besar untuk mempertahankan pengaruhnya di seluruh penjuru dunia. Perpanjangan dari adanya strategi *Pivot*, dalam konteks politik, strategi ini dapat dimaknai sebagai kebangkitan strategi penahanan Perang Dingin AS melawan negara

adidaya yang sedang tumbuh seperti Rusia dan Tiongkok. Sehingga TPP melambangkan komitmen AS untuk mempertahankan hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara di Asia Timur. Dengan meningkatkan kepercayaan di Asia Timur bahwa Amerika Serikat tetap memberikan keterlibatannya di kawasan ini, maka makna Rebalancing atau penyeimbangan sebenarnya adalah memberikan Tiongkok ruang untuk bangkit dengan damai tanpa terlalu mengkhawatirkan negara disekitarnya.

### **3. TPP Sebagai Alat Keamanan di Asia Pasifik**

Adanya persaingan antara Tiongkok dan AS untuk dominasi politik dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik ini memicu ketegangan dan militerisme yang ada di wilayah ini. Konflik di wilayah pulau kecil di Laut Filipina Barat sedang digunakan oleh AS sebagai strategi untuk meningkatkan kehadiran kekuatannya di wilayah tersebut. Adanya penumpukan militer di wilayah ini cukup menarik perhatian. Selain meningkatnya kehadiran militer baik dari AS maupun Tiongkok, negara-negara lain di kawasan seperti Australia, Singapura, dan Jepang juga memperkuat kekuatan militer mereka.

Dalam tarik menarik persaingan di bidang militer ini, perhatian sebenarnya bagi dunia bukanlah tentang sisi mana yang harus menang. Dalam hal ini baik TPP yang digawangi oleh Amerika Serikat maupun RCEP

oleh Tiongkok namun nantinya adalah negara ataupun organisasi mana yang akan memenuhi sektor ekonomi maupun dapat menjamin keamanan global secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Ashton Carter menyatakan dalam pidatonya pada April 2015, bahwa “Perjanjian TPP tersebut akan memperkuat aliansi AS di Asia Timur”.<sup>23</sup> TPP akan menjadi kebijakan penting AS untuk mengembangkan dan memperkuat institusi regional dengan cara mendorong kerjasama dan resolusi damai dengan menghormati aturan dan norma yang berlaku. Dalam sisi militer, melalui TPP inilah strategi halus Amerika dalam *Rebalance* dari kekuatan militer di Asia yang semakin maju dan meningkat kekuatannya yang awalnya diawali dari meningkatkan integritas ekonomi dan politik.

#### **4. TPP Sebagai Wadah Penggalangan Mitra Negara Anggota**

Ke- 12 negara anggota TPP merupakan negara yang representatif dalam perkembangan ekonominya di wilayah Asia Pasifik. Namun, Asia Pasifik masih memiliki potensi yang lebih dari kedua belas negara tersebut. Melalui TPP, Amerika Serikat juga berupaya agar sumberdaya atau jumlah keanggotaan dapat bertambah. Penambahan anggota TPP merupakan hal penting bagi Amerika Serikat, guna menggalang mitra ekonomi dan aliansi di kawasan Asia Pasifik ini.

Sehingga diharapkan TPP dapat menjadi jawaban atas tujuan mendasar dari kebijakan AS yang baru untuk memperluas bidang kerjasama yang bermanfaat bagi Amerika Serikat dengan baik dari negara dalam institusi regional yang sekaligus dapat memperkuat hubungan dengan allies dan mitra Amerika, termasuk kekuatan besar seperti Tiongkok, India serta kekuatan regional penting lainnya seperti Indonesia. Kedepannya dari mitra ini dapat mengembangkan norma dan peraturan daerah yang sesuai dengan tatanan keamanan, ekonomi, dan politik internasional yang telah lama didukung oleh Amerika Serikat.

#### **5. TPP sebagai Alat Hukum dalam Perluasan Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik**

Sebagai organisasi yang lebih dari sekedar menjadi kesepakatan dagang, TPP merupakan komponen penting dari skema Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoni di Asia Pasifik. Presiden AS Barack Obama dan Sekretaris Negara Hillary Clinton menjelaskan hal ini selama pertemuan APEC Honolulu pada tahun 2011 bahwa TPP berfungsi sebagai lengan ekonomi strategi AS untuk mempertahankan pengaruh politik dan ekonominya di Asia Pasifik dengan menciptakan rezim hukum di seluruh wilayah yang dapat memenuhi kepentingan yang dapat dijalankan oleh AS dan perusahaannya.<sup>24</sup>

Hal yang membuat TPP begitu mengkhawatirkan adalah implementasi TPP dapat menciptakan otoritas peradilan lebih tinggi dibanding pemerintah nasional, dalam bentuk pengadilan ekstra-yudisial yang diawasi oleh Bank Dunia dan PBB. TPP tidak lain adalah saluran hukum lain untuk mempertahankan negara-negara peserta sehingga mereka tetap berada dalam orbit supremasi hukum. Bagi Amerika Serikat sendiri, hal ini adalah suatu keuntungan dimana TPP jelas merupakan lengan ekonomi dari kebijakan Pivot to Asia, yang dapat menjadi alat ekonomi strategis di dalam rezim tata kelola perusahaan yang sekaligus dapat mengikat secara hukum, dengan janji tersedianya akses pasar AS yang bebas dan tidak terbatas. TPP menjadi peluang alat hukum yang baru baik bagi Amerika Serikat maupun negara anggotanya, dimana Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai organisasi yang menggawangi perdagangan dunia sebenarnya tidak dapat memperbarui peraturan perdagangan dan investasi selama dua puluh tahun terakhir.

#### **E. Kesimpulan**

Amerika Serikat meyakini bahwa TPP adalah satu – satunya perjanjian perdagangan yang mengandung peraturan yang komprehensif dan terkini, yang dapat menghadapi isu dan tantangan permasalahan ekonomi abad ini. Peraturan seperti *intellectual property*, lingkungan,

ketenagakerjaan, investasi dan badan usaha milik negara dengan menonjolkan penghapusan tarrif dan hambatan dalam perdagangan merupakan keunggulan utama TPP yang dapat membawa kesejahteraan ekonomi.

Amerika meyakini TPP sebagai organisasi kerjasama yang dapat meyatukan negara – negara anggotanya di kawasan Asia Pasifik dalam satu *frame* geografi dengan landasan yang kuat yakni memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Diharapkan TPP ini dapat menjadi wadah regionalisme di kawasan Asia Pasifik yang dapat berkelanjutan dan mengajak negara lain di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung. Amerika Serikat mengutamakan adanya integrasi regional yang dapat memajukan ekonomi dan kestabilan kawasan di wilayah Asia Pasifik. TPP adalah salah satu dari contoh adanya neoliberalisme institusional dapat menjadi solusi untuk dapat memajukan kerjasama di antara negara-negara anggotanya.

Amerika Serikat menjadikan kawasan Asia Pasifik ini sebagai mitra utama agar dapat saling mendukung dalam perkembangan kedepanya. Dalam konsep *Rebalance toward Asia*, dimaknai sebagai adanya pertumbuhan pesat di kawasan Asia yang mendorong Amerika Serikat untuk mengarahkan kebijakan politik dan ekonominya terpusat pada Asia. Sehingga rasionalitas Amerika Serikat dalam *Rebalance toward Asia* dalam kebijakan perdagangan di TPP diharapkan dapat secara langsung

membantu meningkatkan lapangan kerja serta ekonomi di Amerika Serikat pasca krisis dan dapat memberikan kestabilan dalam jangka panjang. Sedangkan perpanjangan dari rasionalitas TPP sebagai alat ekonomi adalah adanya kesempatan bagi Amerika Serikat untuk dapat memberikan pengaruh *power* di kawasan Asia Pasifik yang saat ini mulai tersaingi oleh Tiongkok.

## Catatan Kaki

---

<sup>1</sup> Teguh Sihono. *Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 5 Nomor 2, Desember 2008. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6757&val=444>. Diakses pada 28 Mei 2016.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Hadiedi Prasaja. *Membangun ASEAN Sebagai Kawasan Berdaulat*. Serikat Petani Indonesia <http://www.spi.or.id/?p=4443>. Diakses pada 1 Juni 2016.

<sup>6</sup> President Obama at The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). <http://www.whitehouse.gov/blog/2011/11/13/president-obama-asia-pacific-economic-cooperation-apec>. Diakses pada 29 Mei 2016 .

<sup>7</sup> Ian F. Fergusson and Bruce Vaughn, *The Trans-Pacific Partnership Agreement*, Hal 1. . Congressional Research Service. 12 Desember 2011 . <http://fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf> Diakses pada 14 Juni 2016.

<sup>8</sup> Meredith Kolsky Lewis. *The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm or Wolf in Sheep's Clothing?* *Boston College International and Comparative Law Review*. Volume 34 | Issue 1. <http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=iclr>. Diakses pada 29 Mei 2016 .

<sup>9</sup> Robert Jackson dan Gorge Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 155

<sup>10</sup> Sterling-Folker, J. (2013). *Neoliberalism*. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, *International Relations Theories* (pp. 114-130). Oxford University Press.

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress in Trade Policy <https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33743.pdf>. Diunduh pada 6 Mei 2017.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> The Year in Trade 2010. USITC. [https://www.usitc.gov/publications/332/pub4247\\_o.pdf](https://www.usitc.gov/publications/332/pub4247_o.pdf). Diunduh pada 13 Mei 2017.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Intellectual Property Rights. <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-chapter-chapter-negotiating-9>. Diakses pada 12 Mei 2017.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Cathleen Cimino-Isaacs, Research Associate, Peterson Institute for International Economics.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> *Asia-Pacific Trade And Investment Report*. 2009. [http://www.unescap.org/sites/default/files/5%20-%20Introduction\\_1.pdf](http://www.unescap.org/sites/default/files/5%20-%20Introduction_1.pdf). Diunduh pada 15 Mei 2017.

---

<sup>20</sup> Dennis Rumley. *The Geopolitics of Asia-Pacific Regionalism in the 21st Century*. <http://www.i-repository.net/contents/outemon/ir/501/501051205.pdf>. Diunduh pada 15 Mei 2017.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Pamintuan Marjorie. *The TPP and the Race to Rule Trade in Asia Pacific*. <http://www.counterpunch.org/2015/11/06/the-tpp-and-the-race-to-rule-trade-in-asia-pacific/>. Diakses pada 3 Mei 2017.

<sup>23</sup> Tom Donilon. 2013. *The President's Free Trade Path to Prosperity*, *Wall Street Journal* 30. <https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323741004578420843565131294>. Diakses pada 7 Mei 2017

<sup>24</sup> Secretary Clinton to Deliver Remarks on America's Pacific Century at APEC Leaders Week in Hawaii on November 10. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/176853.htm>. Diakses pada 16 Mei 2017

---

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Robert Jackson dan Gorge Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 155

Sterling-Folker, J. 2013. *Neoliberalism*. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, *International Relations Theories*. Oxford University Press. Hal. 114-130.

### **Jurnal:**

Meredith Kolsky Lewis. *The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm or Wolf in Sheep's Clothing?* *Boston College International and Comparative Law Review*. Volume 34 | Issue 1.  
<http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=iclr>.

Teguh Sihono. *Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia*. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2008.  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6757&val=444>.

### **Web:**

---

Hadiedi Prasaja. *Membangun ASEAN Sebagai Kawasan Berdaulat*. Serikat Petani

Indonesia <http://www.spi.or.id/?p=4443>.

Ian F. Fergusson and Bruce Vaughn, *The Trans-Pacific Partnership Agreement*, Hal

1. Congressional Research Service. 12 Desember 2011 .

<http://fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf>

Pamintuan Marjorie. *The TPP and the Race to Rule Trade in Asia Pacific*.

<http://www.counterpunch.org/2015/11/06/the-tpp-and-the-race-to-rule-trade-in-asia-pacific/>.

President Obama at The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

<http://www.whitehouse.gov/blog/2011/11/13/president-obama-asia-pacific-economic-cooperation-apec>.

Secretary Clinton to Deliver Remarks on America's Pacific Century at APEC

Leaders Week in Hawaii on November 10. <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/176853.htm>.

Tom Donilon. 2013. *The President's Free Trade Path to Prosperity*, *Wall Street*

*Journal*

30. <https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323741004578420843565131294>.

UNESCAP. *Asia-Pacific Trade And Investment Report*. 2009.

[http://www.unescap.org/sites/default/files/5%20-%20Introduction\\_1.pdf](http://www.unescap.org/sites/default/files/5%20-%20Introduction_1.pdf).

---

USTIC. The Year in Trade 2010. USITC.

[https://www.usitc.gov/publications/332/pub4247\\_0.pdf](https://www.usitc.gov/publications/332/pub4247_0.pdf)

USTR. Intellectual Property Rights. <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-chapter-chapter-negotiating-9>.

**Wawancara:**

**Interview Skype dan Telepon:**

Carlos A. Kuriyama. ( *Senior Analyst* APEC, tentang TPP) pada tanggal 27 Maret 2017

Dea Pradana. (Staff Pusat Studi Amerika dan Eropa, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri) pada 15 April 2017

**Interview E-mail:**

Cathleen Cimino-Isaacs. (Research Associate, Peterson Institute for International Economics), email untuk peneliti pada tanggal 29 April 2017